

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

Belanja Daerah Purbalingga Diproyeksi Naik 6,49 Persen, Masih untuk Penanganan Dampak Covid

<https://banyumas.tribunnews.com/2021/08/15/belanja-daerah-purbalingga-diproyeksi-naik-649-persen-masih-untuk-penanganan-dampak-covid>

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Perubahan APBD 2021 diperkirakan naik Rp 4.659.930.000.

Hal itu dipaparkan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rencana Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, Jumat (13/8/2021).

"Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan naik Rp 4.659.930.000 atau 0,24 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.975.765.702.000 sehingga menjadi Rp 1.980.425.632.000," ungkap Tiwi, sapaan bupati, dalam rilis yang diterima, Sabtu (14/8/2021).

Tiwi mengatakan, kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari beberapa pos pendapatan. Di antaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 31.521.294.000. Dan pos lain-lain [pendapatan daerah](#) yang sah sebesar Rp 6.566.549.000.

Namun, juga berkurang dana transfer sebesar Rp 33.427.913.000 karena adanya pemotongan DAU oleh pemerintah pusat, serta adanya sisa DAK nonfisik tahun 2020.

Sementara itu, lain-lain [pendapatan daerah](#) yang sah mengalami kenaikan karena adanya setoran pengembalian hibah Pilkada tahun 2020.

Selain proyeksi [pendapatan daerah](#) naik, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2021 juga naik.

Belanja daerah direncanakan naik 6,49 persen atau Rp 130.889.138.000. Dari Rp 2.016.926.613.000 menjadi Rp 2.147.815.751.000.

Belanja daerah di antaranya untuk membiayai pemenuhan kekurangan belanja wajib pemerintah. Penyediaan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, utamanya penanganan kesehatan.

Hal itu untuk membelanjakan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, penyediaan pendidikan, pertanian, penyediaan sarpras perdagangan serta kegiatan prioritas SKPD lainnya.

"Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan Rp 126.229.208.000. Kenaikan bersumber dari Silpa 2020 yang sebagian besar merupakan Silpa yang terikat BLUD, BOS, tunjangan sertifikasi, serta sisa Dana Alokasi Khusus," imbuhnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan tetap, yakni sebesar Rp 12.067.426.000.

Dengan demikian, terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 167.390.119.000, yang digunakan untuk menutup defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

(Tribunbanyumas/jti)